

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN APLIKASI *SMART* KAMPUNG SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

Oleh:

Hagi Rohidatul Umam¹, Safrieta Jatu Permatasari², Herwin Kurniadi³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: hagirohidadatulmam@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses how the communication strategy implemented by the Grogol Village Government in running the Smart Village application program as a form of digital-based public service innovation. The background of this research departs from the importance of utilizing information technology to improve the quality of community services at the village level. This application is expected to simplify the administrative process, as well as provide faster and more efficient access to services for residents. However, its implementation in the field still faces various obstacles, such as the lack of public understanding of digital technology, limited supporting facilities, and a strong conventional service culture. This research was conducted using a descriptive qualitative approach and relied on data collection methods in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the communication strategy implemented by the village government reflects the five main elements of communication according to Harold Lasswell, namely: who conveys (communicator), what is conveyed (message), through what channel (media), to whom (message receiver), and what impact is caused (effect). Although various forms of socialization have been carried out, the effectiveness of communication has not fully reached all elements of society. Therefore, a more effective communication strategy is needed that actively involves the community, and is in line with social conditions and digital capabilities and digital capabilities of villagers. Increasing digital literacy and providing adequate infrastructure are important supporting factors for the success and sustainability of the Smart Kampung application so that it can be maximally utilized.

Keywords: communication strategy, village government, Smart Village

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Grogol dalam menjalankan program aplikasi *Smart* Kampung sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat di tingkat desa. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi, serta

memberikan akses layanan yang lebih cepat dan efisien bagi warga. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, terbatasnya fasilitas penunjang, serta budaya pelayanan konvensional yang masih kuat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah desa mencerminkan lima unsur utama komunikasi menurut Harold Lasswell, yaitu: siapa yang menyampaikan (komunikator), apa yang disampaikan (pesan), melalui saluran apa (media), kepada siapa (penerima pesan), dan dampak apa yang ditimbulkan (efek). Meski berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih efektif yang melibatkan masyarakat secara aktif, serta selaras dengan kondisi sosial dan kemampuan digital warga desa. Peningkatan literasi digital dan penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendukung penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan aplikasi *Smart Kampung* agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kata Kunci: *Strategi Komunikasi, Pemerintah Desa, Smart Kampung*

I. PENDAHULUAN

Perubahan cara pemerintah dalam melayani masyarakat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan paradigma dalam pengelolaan sektor publik, hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sehingga menuntut pemerintah untuk terus melakukan perubahan terkait dengan pelayanan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Kurniawan, 2007). Pada awalnya, pendekatan tradisional berbasis birokrasi menjadi model yang dominan, dengan struktur hierarki dan prosedur yang ketat. Namun, seiring dengan tuntutan akan efisiensi dan hasil yang lebih nyata, lahirlah pendekatan *New Public Management* (NPM), yang membawa prinsip-prinsip manajerial dan orientasi pada hasil ke dalam sektor publik. Selanjutnya, paradigma *New Public Service* (NPS) hadir sebagai respons terhadap kritik terhadap NPM, dengan fokus pada kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan nilai-nilai bersama.

Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi tantangan baru dalam era digital, di mana masyarakat mengharapkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. *E-Government* menghadirkan solusi dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan keterbukaan data, serta memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Inovasi seperti aplikasi pelayanan publik, seperti portal informasi pemerintah, hingga sistem transaksi elektronik telah mengubah cara pemerintah memberikan layanan dan melibatkan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (Ahmad, 2012). Namun, transisi dari NPS ke *E-Government* tidak selalu berjalan mulus. Di satu sisi, *E-Government* memberikan peningkatan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi di sisi lain, implementasinya

menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan seperti kesenjangan teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat dan birokrasi menjadi salah satu faktor penghambat yang harus diselesaikan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pendekatan digital dapat mengurangi aspek humanis yang menjadi inti dari NPS, seperti interaksi langsung dan empati dalam pelayanan publik.

Pada konsep *E-Government* diharapkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah itu dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Salah satu inovasi yang lahir adalah penggunaan aplikasi digital dalam layanan publik. Di tingkat desa, aplikasi *Smart Kampung* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada warga (Ahmad Faishol Ns, 2024). Implementasi *Smart Kampung* juga sangat bergantung pada strategi komunikasi pemerintah desa, hal ini dikarenakan komunikasi merupakan sebuah langkah awal yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan suatu program atau kebijakan dan juga pemahaman tentang teknologi informasi di tingkat perangkat desa menjadi sangat penting. Untuk itu, penguatan sumber daya manusia desa perlu menjadi prioritas, dengan memberikan pelatihan yang tepat agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sistem berbasis teknologi secara efektif.

Penerapan konsep smart kampung diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan konsep *e-government* yang saat ini tengah dijadikan dasar pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Smart Kampung* merupakan konsep pengembangan desa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk di lokasi penelitian yang diambil peneliti, yakni di Desa Grogol, Kecamatan Giri.

II. METODE

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang bertujuan untuk memahami tentang realitas sosial dengan memberikan gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan (Siswadi, 2022). Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan cara analisis (Salusti et al., 2024), Berdasarkan pernyataan tersebut, pendekatan kualitatif merupakan serangkaian proses yang disebut prosedur penelitian yang akan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun disampaikan secara lisan oleh informan serta perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk memperoleh data secara mendalam, dapat digunakan untuk mengembangkan teori serta untuk

mendeskripsikan fenomena atau masalah dengan memberikan jawaban yang akurat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti (Siswadi, 2024). Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi yang sesuai dari gejala atau fenomena (kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Priatna, 2017). Dalam melakukan observasi langsung, peneliti membawa data observasi yang sebelumnya telah disusun untuk dilakukan pengecekan, kemudian kejadian yang diamati disesuaikan dengan data observasi. Menurut (Sugiyono, 2017), wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, maka dalam wawancara membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menunjang dalam penelitian. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui informasi secara mendalam mengenai informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak ditemukan melalui observasi.

Menurut (Sugiyono, 2015), mengungkapkan bahwa dokumentasi adalah cara mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel dari data yang telah tersedia berupa catatan, surat kabar, transkrip, buku, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, menganalisis, dan menyelidiki buku-buku resmi maupun tidak resmi, transkrip, foto, kebijakan, peraturan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data menurut Walidin (2015) terdapat keselarasan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, di antaranya yaitu: kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*). Teknik analisis data yang digunakan terdapat tiga tahapan menurut (Sugiyono, 2015) yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan temuan terkait dengan strategi komunikasi yang

dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan aplikasi *Smart* kapung sebagai inovasi pelayanan publik digital. Penerapan konsep smart kampung diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan konsep *e-government* yang saat ini dijadikan dasar pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, termasuk pada unit pemerintahan terendah, yakni pemerintah desa ataupun kelurahan. Terutama pada lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti, yakni di Desa Grogol, Kecamatan Giri. Dengan kata lain, aplikasi *Smart* Kampung dirancang untuk menghadapi permasalahan di daerah pedesaan, seperti lambatnya proses pelayanan publik serta kurangnya akses informasi, sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penerapan Masterplan *Smart City*.

Dengan adanya aplikasi smart kampung pelayanan publik dapat diakses secara online, masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya menghemat waktu dan biaya. Namun, agar aplikasi ini berhasil optimal, pemerintah desa memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan memerlukan pendekatan yang tepat agar tujuan program tersebut dapat tercapai (Widodo & Permatasari, 2020).

Sebagai pemegang peran utama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, kebijakan, serta program-program kepada masyarakat dengan cara yang transparan, akurat, dan mudah dipahami. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan legitimasi kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun, dengan perkembangan yang terus berlangsung, sektor publik sering dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Salah satu tantangannya adalah keragaman informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat literasi yang beragam.

Untuk melihat keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan aplikasi *Smart* kampung, dalam hal ini peneliti berpedoman pada pemikiran dari Lasswel yang terdiri dari beberapa indikator yaitu: komunikator, pesan, media atau saluran, sasaran, dan efek. Berikut pembahasan yang didapatkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dari para informan, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat.

1. Komunikator

Kesimpulan dari indikator komunikasi yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara dan observasi adalah kepala dusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi *Smart* kampung kepada warganya. Dari keempat kepala

dusun yang dijadikan sebagai informan, didapatkan fakta bahwa mereka telah memberikan informasi terkait tata cara penggunaan serta fungsi dari aplikasi *Smart* kampung yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan semestinya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi tersebut. Di sisi lain, sebagian kecil masyarakat juga masih belum mempunyai ponsel untuk mengakses aplikasi. Terlebih, tingkat literasi digital di Desa Grogol masih tergolong minim, terutama pada masyarakat lanjut usia.

Dengan demikian, pemerintah desa grogol terutama kepala dusun sebagai perantara informasi yang didapatkan dari desa (komunikator) yang berpedoman pada Perbup Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penerapan Masterplan *Smart City* Melalui Banyuwangi Smart Kampung, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar penggunaan aplikasi smart kampung dapat ditingkatkan serta digunakan secara maksimal.

2. Pesan

Kesimpulan dari indikator pesan yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara dan observasi adalah penggunaan aplikasi smart kampung yang tercantum dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penerapan Masterplan *Smart City* Melalui Banyuwangi *Smart* Kampung diimplementasikan secara terstruktur, berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Grogol, sebelumnya pemerintah desa telah mendapatkan surat himbauan dari Kantor Camat Giri terkait penggunaan *Smart* kampung. Menanggapi himbauan tersebut, kepala desa kemudian menyampaikannya kepala dusun untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat sebagai penanggung jawab wilayah. Sedangkan operator pelayanan berperan sebagai koordinator, sehingga apabila masyarakat mengajukan layanan administrasi *online* melalui aplikasi *Smart* kampung, operator pelayanan dapat meneruskannya kepada kepala desa ataupun kantor dinas terkait untuk segera diproses dan mendapatkan persetujuan. Namun pada kenyataannya, pesan yang disampaikan oleh para komunikator masih belum sepenuhnya merata. Hal ini disebabkan oleh banyaknya informasi yang harus disampaikan terkait penggunaan aplikasi *Smart* kampung beserta fitur-fiturnya kepada setiap masyarakat dengan latar belakang sosial dan literasi digital yang beragam.

Dengan demikian pemerintah desa sebagai penyalur pesan harus meningkatkan koordinasi antar unit kerja agar pesan dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga program *Smart* kampung sebagai inovasi pelayanan publik digital dapat terimplementasikan secara maksimal di Desa Grogol.

3. Media atau saluran

Kesimpulan dari indikator media atau saluran yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara dan observasi adalah upaya Pemerintah Desa Grogol dalam menyampaikan penggunaan aplikasi *Smart Kampung* kepada masyarakat dilakukan secara bertahap. Kepala desa menugaskan perangkat desanya untuk mempelajari segala bentuk layanan yang tersedia di dalam aplikasi, sehingga apabila mereka telah menguasai kegunaannya, mereka dapat menyampaikannya secara menyeluruh kepada masyarakat. Sedangkan perangkat desa yang diberi tanggung jawab lebih untuk mensosialisasikan aplikasi ini merupakan kepala dusun, penyampaian informasi dilakukan melalui metode yang beragam. Salah satunya, dengan bekerja sama dengan pihak sekolah. Sebab, lingkungan sekolah dinilai sebagai tempat yang strategis untuk menyampaikannya isi program secara langsung kepada siswa maupun para orang tua, sehingga aplikasi *Smart Kampung* dapat dikenal di berbagai kalangan usia. Selain itu, kepala dusun kerap kali melakukan sosialisasi dan penyaluran informasi melalui media sosial seperti grup whatsapp kepala dusun dan ketua rt, proses penyebaran informasi ini juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial atau kerja bakti, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, kepala dusun menghadapi berbagai tantangan dalam usaha menyampaikan pesan, salah satunya sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap kemudahan pelayanan secara digital. Dibuktikan dengan, masih banyaknya masyarakat yang datang ke kantor desa untuk memperoleh pelayanan administratif, padahal aplikasi *Smart kampung* sebenarnya dapat menyelesaikan urusan administratif mereka tanpa harus mengantre di kantor desa.

Dengan demikian, pemerintah desa seharusnya memberlakukan sosialisasi secara langsung pada setiap dusun dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat yang ada pada setiap dusun yang ada.

4. Penerima pesan

Kesimpulan dari indikator penerima pesan yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara dan observasi adalah terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi *Smart kampung*. Salah satu hambatannya adalah kesulitan saat akan melakukan aktivasi akun, karena harus melalui berbagai tahapan verifikasi, di antaranya: input nomor NIK, verifikasi email, serta pembuatan kata sandi atau *password*. Alur tersebut seringkali dirasa membingungkan sebagian masyarakat, sebab pembuatan kata sandi atau *password* terkadang memerlukan beberapa kali percobaan agar dianggap cukup aman dan sesuai oleh sistem. Selain itu, fitur-fitur pada aplikasi ini dianggap masih perlu dilakukan

penyederhanaan, karena masyarakat sebagai penerima layanan harus melakukan *self service* tanpa dipandu oleh operator. Terlebih sebagian masyarakat masih memilih cara lama untuk datang langsung ke kantor desa untuk mendapatkan pelayanan administratif, karena dianggap lebih mudah jika dibandingkan dengan menggunakan aplikasi smart kampung. Mengesampingkan kemudahan yang seharusnya di dapatkan jika aplikasi ini dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan demikian, baik masyarakat maupun Pemerintah Desa Grogol harus meningkatkan kesadaran serta koordinasi agar kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi Smart Kampung dapat terimplementasikan dan dirasakan secara nyata.

5. Efek

Kesimpulan dari indikator efek yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara dan observasi adalah Pemerintah Desa Grogol merasa sangat terbantu, sebab dengan adanya aplikasi *Smart Kampung* sebenarnya dapat membantu beban kerja perangkat desa menjadi lebih efektif dan efisien. Karena menurut perangkat desa, aplikasi *Smart Kampung* memiliki beberapa kelebihan, karena dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai dokumen administrasi secara *online*. Sedangkan menurut masyarakat, kemudahan dari aplikasi ini masih belum dirasakan secara nyata. Karena pada kenyataannya, proses penggunaan aplikasi cenderung rumit, baik dari proses aktivasi sampai dengan penggunaan fitur-fiturnya.

Dengan demikian, pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi *Smart Kampung* kepada masyarakatnya. Didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, selain itu masyarakat juga memerlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan strategi komunikasi oleh Pemerintah Desa Grogol dalam penggunaan aplikasi *Smart Kampung* sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan minimnya literasi digital, terbatasnya akses terhadap perangkat teknologi, serta kebiasaan warga yang masih terbiasa mengurus administrasi secara konvensional.

Pemerintah desa sebenarnya telah menerapkan strategi komunikasi dengan mengacu pada lima elemen utama dari model Harold Lasswell, yaitu: (1) *Komunikator*, peran penyampai

pesan dipegang oleh kepala desa dan kepala dusun. Meskipun mereka telah aktif melakukan sosialisasi, masih dibutuhkan peningkatan kemampuan komunikasi agar pesan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih merata. (2) *Pesan*, informasi yang disampaikan mencakup manfaat serta cara penggunaan aplikasi Smart Kampung. Namun, isi pesan tersebut belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat karena perbedaan latar belakang dan tingkat literasi digital yang bervariasi. (3) *Media atau saluran*, beragam saluran telah dimanfaatkan, seperti media sosial, forum masyarakat, hingga kegiatan kemasyarakatan. Namun, belum semua metode ini efektif menjangkau warga desa secara menyeluruh, terutama kalangan lanjut usia atau yang kurang familiar dengan teknologi. (4) *Penerima Pesan*, warga sebagai penerima informasi masih menemui kesulitan, baik dalam proses registrasi, verifikasi, maupun penggunaan fitur dalam aplikasi. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat masih memilih cara lama dengan mendatangi kantor desa secara langsung. (5) *Efek*, dari sisi perangkat desa, penggunaan aplikasi ini telah membantu mempercepat dan mempermudah pekerjaan administratif. Namun di sisi masyarakat, manfaat dari aplikasi belum sepenuhnya dirasakan karena masih adanya hambatan teknis dan psikologis.

Dari temuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi *Smart Kampung* sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi yang baik, melibatkan partisipasi masyarakat, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural desa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital, perbaikan sarana prasarana pendukung, serta penumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital agar pelayanan publik dapat dirasakan secara lebih merata, cepat, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2012). Perjalanan Old Public Administration (Opa), New Public Management (Npm), New Public Service (Nps) Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 1(1), 1–25.
- Drs. Ahmad Faishol Ns, M. C. (2024). *Smart Kampung - Integrated*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan Npm Ke Good Governance. *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 52–70.
- Priatna, T. (2017). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cv. Insan Mandiri.
- Salusti, J. M., Imaniar, D., & Permatasari, S. J. (2024). *Peran Rumah Kreatif Dalam Meningkatkan*

Kualitas Pelayanan Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pelaku Umkm Pada Akrab). 9(1), 75–84.

Siswadi, G. A. (2022). *Konsep Merdeka Belajar Dalam Kurikulum Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Penguatan Karakter Pelajar Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

Siswadi, G. A. (2024). *Implikasi Motivasi Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Agama Hindu Di Tengah Hegemoni Budaya Industri Di Sman 8 Denpasar*. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 29 (2), 156-177.

Sugiyono. (2015a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City*. *Ettisal*, 5(1), 79–89.